

PEMKOT SIAP KOLABORASI SUKSESAN PEMILU 2024

Dilantik, PPK Dituntut Berintegritas Tinggi



KR-Ardhi Wahdan

Prosesi pengambilan sumpah dan serah terima SK pelantikan PPK untuk Pemilu 2024.

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya berhasil melantik jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Badan adhoc tersebut dituntut memiliki integritas yang tinggi guna mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis.

Ketua KPU Kota Yogya Hidayat Widodo, menilai jajaran PPK memegang peran strategis karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Sebagai kepanjangan tangan dari KPU, maka PPK harus mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab, teliti, jujur, adil dan berintegritas," tandasnya usai pelantikan di Hotel Santika, Rabu (4/1).

Total terdapat 70 petugas PPK yang dilantik. Masing-masing kemantren diisi oleh lima petugas PPK. Sekitar 30 persen di antaranya pernah menduduki jabatan yang sama pada pemilu sebelumnya. Sesuai aturan yang baru, tidak ada batasan bagi anggota PPK yang sebelumnya pernah menjabat.

Hidayat mengaku, pihaknya senang karena meminta anggota PPK untuk mengenakan busana adat Jawa

dalam prosesi pelantikan. Di samping menjaga tradisi, hal itu dimaksudkan agar mampu memberikan inspirasi dalam menjalankan ketugasan ke depan.

"Meski tugasnya nanti berkaitan erat dengan dunia politik namun sebagai penyelenggara harus tetap menjaga budaya unggah ungguh," tandasnya.

Masa kerja PPK dalam pemilu kali ini juga akan cukup panjang. Apalagi saat ini tahapan Pemilu 2024 juga sudah mulai berjalan. Oleh karena itu setelah dilantik jajaran PPK harus segera menyusun struktur organisasi mulai dari ketua hingga masing-masing divisi. Seiring dengan pelantikan, jajaran pengurus KPU Kota Yogya juga langsung memberikan bimbingan teknis.

Ketika struktur organisasi telah

terbentuk, imbu Hidayat, para anggota PPK juga wajib menjalin koordinasi dengan para mantri pamong praja, polsek maupun koramil setempat. Upaya tersebut harus ditempuh supaya memudahkan kinerja di wilayah. "Kami juga akan terus mengawasi supaya tidak ada tendensi atau kepentingan lain selain terwujudnya asas pemilu," katanya.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, yang hadir pada kesempatan tersebut mengaku siap berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU. Terutama demi kesuksesan dan kelancaran Pemilu 2024. Bentuk kolaborasi selama ini sudah diwujudkan dengan dukungan anggaran maupun regulasi.

"Mereka sudah melalui tahap seleksi yang ketat. Harapannya bisa bekerja dengan baik. Anggaran yang menjadi kewenangan daerah, baik untuk tahun 2023 maupun 2024 sudah kami siapkan. Termasuk nanti regulasi yang dibutuhkan, kami akan mengikuti PKPU nya," tandasnya. (Dhi)-f

TAK TEMUKAN ADUAN 'NUTHUK' HARGA

Dispar Upayakan Perbaikan Layanan Wisatawan

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogya mengupayakan perbaikan layanan wisatawan pada momentum libur panjang selanjutnya. Hal ini merujuk hasil evaluasi sementara selama libur natal dan tahun baru (nataru) ketika terjadi lonjakan wisatawan.

Kepala Dispar Kota Yogya Wahyu Hendratmoko, mengaku lonjakan wisatawan sangat mungkin terjadi ketika ada libur panjang tahun ini.

"Kami coba evaluasi pada liburan kemarin. Ke depan memang perlu ada beberapa persiapan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Pola layanan akan kami perbaiki," akunya, Rabu (4/1).

Menurutnya, berbagai pembenahan itu di antaranya pada aspek layanan informasi kepada wisatawan. Meskipun Dispar Kota Yogya sudah membuka dua posko Tourist Information Service (TIS) di dua lokasi selama libur akhir tahun yakni di Plaza Malioboro dan di timur Museum Sonobudoyo, namun jam layanan perlu disesuaikan.

Pada libur nataru kemarin, posko TIS beroperasi dari pukul 09.00 hingga 21.00 WIB pada 24-31 Desember 2022. Akan tetapi dirinya menyebut masih banyak wisatawan yang datang bahkan

hingga tengah malam di kawasan Malioboro.

"Sebaiknya jam operasional posko memang diperpanjang. Banyak wisatawan dari mancanegara yang justru datang saat malam hari dan mereka membutuhkan informasi mengenai kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada malam hari," imbu Wahyu.

Oleh karena itu keberadaan posko TIS tersebut tetap akan dipertahankan saat libur panjang mendatang dengan jam operasional yang dimungkinkan akan diperpanjang. Meski sudah ada layanan online atau daring yang bisa diakses 24 jam, tetapi banyak wisatawan yang justru lebih sebanding dengan bertanya langsung.

Wahyu mengaku, keluhan yang dilayangkan wisatawan selama libur akhir tahun lebih banyak pada permasalahan parkir dan kebijakan penutupan ruas jalan serta keluhan mengenai oknum pengamen yang dinilai tidak simpatik. Pihaknya pun sudah menyampaikan ke instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sedangkan keluhan atau aduan terkait harga tidak wajar atau nuthuk yang dialami oleh wisatawan, kali ini tidak ada yang masuk dalam laporan resmi yang diterimanya.

Evaluasi lain ialah terkait kampung wisata yang belum merasakan dampak dari membludaknya kunjungan wisata selama libur akhir tahun.

"Kondisi ini juga menjadi bahan evaluasi kami. Bagaimanapun juga, kampung wisata adalah aset destinasi wisata di Yogyakarta namun mereka belum merasakan ledakan kunjungan wisata akhir tahun," katanya.

Sejumlah faktor yang dinilai menjadi penghambat di antaranya faktor internal karena kampung wisata belum mempersiapkan diri secara matang untuk menerima kunjungan wisata, salah satunya mempercantik kampung. Ada juga pengaruh dari faktor eksternal seperti dukungan promosi kampung wisata yang perlu ditingkatkan.

Meskipun terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisata saat akhir tahun, namun Wahyu belum bisa memastikan jumlah kunjungan wisata saat libur akhir tahun. "Jumlah kunjungan sepanjang 2022 diperkirakan bisa tembus tujuh juta orang karena hingga akhir November saja jumlah kunjungan sudah mencapai enam juta orang. Yang pasti total kunjungan tahun 2022 lalu sudah melebihi target kami yakni 2,2 juta wisatawan," urainya. (Dhi)-f

Laporan Berkualitas Mudahkan Validasi Data

YOGYA (KR) - Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban yang dimaknai sebagai salah satu esensi akuntabilitas kerja. Dalam proses penyusunan tersebut, Kepala OPD bersama jajarannya perlu menyiapkan sebaik-baiknya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ke depan.

"Saya mengapresiasi seluruh OPD di DIY dan kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan melalui berbagai sistem dan berkomitmen untuk dapat menyelesaikan laporan secara tepat waktu. Apalagi dengan adanya kemudahan teknologi dan kemudahan informasi, laporan yang tersusun," kata Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X saat membuka 'Kick Off Meeting Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022' di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Rabu (4/1).

Selain Wagub, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekda DIY K Baskara Aji, Asisten Sekda DIY, Kepala OPD di lingkungan DIY, Sekda kabupaten/kota se-DIY, dan pejabat instansi terkait.

Wagub mengatakan, dengan adanya laporan yang berkualitas akan memudahkan proses verifikasi dan validasi data sebagai dasar bagi penguatan kolaborasi antar OPD. Karena penilaian laporan tersebut telah menilai bagaimana kolaborasi kerjasama lintas OPD, bukan saja dalam penganggaran, tetapi juga sinergi antar OPD bisa terlaksana dengan baik.

"Sekarang sudah tidak zamannya lagi ego sektoral. OPD teknis dan OPD non teknis (penting) untuk saling berkolaborasi," ujarnya.

Menurut Wagub, garis besar dalam penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan tahun 2022 tersebut adalah penyusunan laporan keuangan yang arah kebijakannya adalah mempertahankan opini WTP yang ke-13 kalinya.

"Jadi, kami mohon, karena kami tidak bisa sendirian, perlu kontribusi dari semua pihak. OPD teknis, maupun non teknis, demikian pula OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota dalam rangka menuju WTP ke-13," tandasnya. (Ria)-f

KEBIJAKAN PPKM DICABUT

Ekstrakurikuler di Sekolah Kembali Normal

YOGYA (KR) - Keputusan pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan kegiatan di sekolah lebih leluasa dilakukan. Karena selain sudah tidak ada pembatasan, kegiatan ekstrakurikuler bisa kembali dilaksanakan secara normal.

Tapi karena WHO belum memutuskan status pandemi berakhir, penerapan protokol kesehatan (Prokes) harus tetap dilakukan. Pasalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kondisi seperti sekarang sudah menjadi bagian penting di masyarakat, termasuk sekolah.

"Memang dengan dicabutnya kebijakan PPKM, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang awalnya dibatasi bisa kembali dilakukan secara normal. Karena sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan. Meski begitu terkait dengan sekolah sehat dan PHBS yang saat ini sudah mulai menjadi budaya harus terus dilakukan. Jadi fasilitas untuk cuci tangan tidak perlu dihilangkan, karena kebiasaan itu harus

tetap ditumbuhkan," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Dr Didik Wardaya MPd di Yogyakarta, Rabu (4/1).

Dikatakan, konsekuensi dari adanya kebijakan pencabutan secara otomatis kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi lebih longgar. Kendati demikian bukan berarti warga sekolah bersikap masa bodoh dan mengabaikan penegakan Prokes. Karena selama pandemi belum dinyatakan berakhir penegakan Prokes harus dilakukan. Seperti memakai masker saat berada di dalam ruangan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah.

"Saat ini sudah tidak ada pembatasan jumlah siswa lagi, jadi semua kegiatan sudah berlangsung seperti biasa. Tapi kami tetap meminta seandainya ada warga sekolah yang kondisinya sedang sakit, sebaiknya diberikan dispensasi untuk istirahat di rumah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan," terang Didik. (Ria)-f

Pos Kesehatan Pemkot Layani Vaksinasi Booster

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengoperasikan tiga titik pos kesehatan selama libur natal dan tahun baru (nataru). Salah satu layanan yang diberikan ialah vaksinasi booster Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya drg Emma Rahmi Aryani, menyebut tiga titik pos kesehatan berada di selatan Tugu, Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, dan Taman Pintar Yogyakarta.

Dalam pos kesehatan tersebut disiapkan tim khusus Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta petugas vaksinasi untuk melayani vaksin booster Covid-19. Untuk layanan P3K, petugas tidak sekadar memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Jika perlu tindakan ke rumah sakit, Pemkot

Yogya sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Kota Yogya dan biaya penanganan selama 24 jam akan ditanggung pemerintah.

Sedangkan layanan vaksinasi booster Covid-19, bisa dimanfaatkan oleh wisatawan maupun lansia atau warga Kota Yogya. Terdapat empat penjaga yang ditugaskan sebagai administrasi, wawancara pasien, pemberian vaksinasi dan promosi atau pengetahuan kesehatan setelah divaksinasi.

"Jika wisatawan atau warga Kota Yogya ingin vaksinasi booster di pos pelayanan kesehatan, diharapkan menyesuaikan dengan dosis yang diberikan sebelumnya. Namun untuk vaksinasi kita hanya menyediakan vaksin jenis Pfizer," ujarnya. (Dhi)-f

TAK SEBATAS PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

UPT Labkes Didorong Perluas Layanan

YOGYA (KR) - Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan (Labkes) Dinas Kesehatan Kota Yogya yang berada di Jalan Sisingamangaraja mampu memberikan kemanfaatan dalam pemeriksaan kesehatan lingkungan. Tahun ini pun didorong agar memperluas layanan seiring kebutuhan kesehatan masyarakat yang meningkat.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, untuk memperluas layanan memang dibutuhkan persiapan yang cukup matang. "Tetapi memang perlu ada perluasan layanan untuk kebutuhan laboratorium pemeriksaan kesehatan yang sifatnya klinis, sehingga tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan," terangnya, Rabu (4/1).

Selain membutuhkan banyak persiapan, sarana dan prasarana pendukung juga perlu dicukupi. Hal ini agar fungsi laboratorium kesehatan menjadi semakin maksimal. Pengembangan jenis layanan di UPT Laboratorium Kesehatan tersebut juga sejalan

dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan sehingga nantinya juga dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi laboratorium kesehatan masyarakat.

Aman menambahkan, dari aspek sarana sangat dimungkinkan karena masih ada ruang di UPT Labkes yang bisa dimanfaatkan. Secara bertahap penambahan sarana dan prasarana juga akan terus dilakukan. Selain kebutuhan sarana dan prasarana fisik, pengembangan jenis layanan kesehatan juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni hingga dasar hukum sebagai regulasi untuk mengatur operasional serta tarif layanan.

"Tahun ini kami penuhi kebutuhan sarana dan prasarannya, baru melangkah untuk dasar hukum pada tahun berikutnya. Dimungkinkan dalam waktu dua tahun seluruh kebutuhan untuk pengembangan jenis layanan bisa dipenuhi," urainya.

Sementara itu, Kepala UPT Labkes Dinas Kesehatan Kota Yogya Prie Aka Mahdayanti, mengatakan layanan yang dilakukan

lebih banyak pada pemeriksaan kesehatan lingkungan seperti kualitas air bersih dan air minum serta pemeriksaan kesehatan makanan. Tujuannya untuk memastikan tidak mengandung bahan tambahan berbahaya. Layanan pemeriksaan kesehatan lingkungan sebagian besar dilakukan melalui petugas puskesmas yang memeriksa sampel dari depot air minum isi ulang dan kondisi air sumur warga.

"Selama pandemi Covid-19, kami ikut membantu melakukan pemeriksaan atau skrining dengan tes antigen. Saat ini sudah ada penambahan beberapa peralatan untuk tes kesehatan seperti cek urine, gula darah, kolesterol dan lainnya," katanya.

Fasilitas laboratorium yang dimiliki UPT Labkes juga sudah cukup aman karena masuk kategori biosafety laboratorium level 2 sehingga keamanan petugas dan sampel terjamin. Pihaknya pun telah menyiapkan inovasi dengan membuat paket pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta. (Dhi)-f